

**EFEKTIVITAS MANAJEMEN PENERIMAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR
NANGGALO DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



DISUSUN OLEH:
IIS MARDIANA FIRJAYANTI
NIM.21042388

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

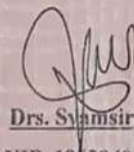
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Manajemen Penerimaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Nanggalo dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Padang
Nama : Iis Mardiana Firjayanti
NIM/TM : 2021 / 21042388
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Oktober 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D

NIP. 196304011989031003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Senin, 3 November 2025 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB
Efektivitas Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Nanggalo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Padang

Nama : Iis Mardiana Firjayanti
TM/NIM : 2021 / 21042388
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 3 November 2025

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	1. 
Anggota : Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA	2. 
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	3. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Afriza Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Mardiana Firjayanti
NIM/BP : 21042388 / 2021
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Efektivitas Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Nanggalo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang"** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Iis Mardiana Firjayanti

21042388

ABSTRAK

Iis Mardiana Firjayanti 21042388 Efektivitas Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Nanggalo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya optimalisasi sistem e-retribusi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo Kota Padang yang berdampak pada efektivitas kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan terdiri dari 12 pedagang, Kepala UPTD Pasar Nanggalo, petugas pemungut retribusi, dan staf Dinas Perdagangan Kota Padang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target retribusi dan kepatuhan pedagang tinggi melalui sistem e-retribusi QRIS, namun terkendala perencanaan sentralistik, keterbatasan SDM, infrastruktur telekomunikasi tidak memadai, minimnya transparansi, dan kesenjangan literasi digital. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen retribusi Pasar Nanggalo belum optimal secara menyeluruh meskipun target tercapai, sehingga diperlukan forum partisipatif, penambahan petugas, peningkatan infrastruktur, transparansi pelaporan, pelatihan literasi digital, dan sistem tarif progresif untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Padang.

Kata Kunci: Efektivitas Manajemen, Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Daerah, E-Retribusi, Pasar Nanggalo.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Nanggalo dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang”**. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siska Sasmita S.IP., MPA selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan, serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

8. UPTD Pasar Nanggalo, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Pedagang Pasar Nanggalo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang sangat penulis cintai, serta saudara kandung penulis yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan, dan waktu luang kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Amin.

Padang, 25 Oktober 2025

Iis Mardiana Firjayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kajian Teoritis.....	17
1. <i>Grand Theory</i> (Efektivitas Manajemen Publik).....	17
2. Manajemen Publik	21
3. Konsep Efektivitas	28
4. Retribusi Daerah.....	31
5. Retribusi Pelayanan Pasar	35
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39
B. Kajian Penelitian yang Relevan	42
C. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Informan Penelitian	51
E. Jenis dan Sumber Data	54

F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Uji Keabsahan Data.....	55
H. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Temuan Umum.....	59
1. Gambaran Umum Pasar Nanggalo.....	59
2. Struktur Kepedagangan dan Klasifikasi Los.....	63
3. Potensi dan Realisasi Penerimaan Retribusi	65
4. Dasar Hukum Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar	66
B. Temuan Khusus.....	68
1. Efektivitas Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Nanggalo Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang	68
2. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Nanggalo	119
3. Upaya dan Strategi dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Nanggalo agar Mampu Berkontribusi Lebih Maksimal terhadap Peningkatan PAD Kota Padang	128
C. Pembahasan.....	137
1. Analisis Berdasarkan Efektivitas Manajemen Publik George R. Terry	137
2. Analisis Berdasarkan Indikator Tingkat Efektivitas Manajemen Retribusi Dewi dkk (2021: 74–78) dan Roekminiati dan Sunarya (2024: 735-738)	141
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Retribusi Pedagang Pasar Nanggalo Lantai 1 Bulan Januari 2025.....	7
Tabel 3. 1 Informan Penelitian Pedangang Pasar Nanggalo	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4. 1 Data UPTD Pasar Nanggalo	60
Gambar 4. 2 Tampak Depan Pasar Nanggalo.....	61
Gambar 4. 2 Suasana Aktivitas Perdagangan di Dalam Pasar Nanggalo	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	154
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	156
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	158
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal di Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri. Kebijakan ini menuntut daerah untuk mampu membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam kerangka otonomi daerah, tingkat kemandirian fiskal suatu daerah menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Daerah yang mandiri secara fiskal memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menyusun program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat yang sifatnya terbatas dan fluktuatif.

Salah satu instrumen utama yang mencerminkan kemandirian fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD yang signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja rutin maupun pembangunan daerah. Menurut Khairani dan Fitri (2022: 756), PAD yang kuat memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Dengan demikian, tingginya PAD bukan hanya mencerminkan aspek finansial, tetapi juga kapasitas institusional dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan

yang sah. Di antara komponen tersebut, retribusi daerah memiliki peranan yang penting, terutama dalam konteks penyediaan layanan publik. Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu jenis retribusi yang potensial adalah retribusi pelayanan pasar, mengingat peran pasar tradisional yang masih menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok sekaligus ruang ekonomi rakyat. Usfomeny dkk (2022: 80) menegaskan bahwa retribusi pelayanan pasar dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan apabila dikelola secara transparan, efektif, dan akuntabel.

Pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan terstruktur. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan utama yang mengatur mekanisme pemungutan, penetapan tarif, serta tata kelola retribusi daerah termasuk retribusi pelayanan pasar. Dalam Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Indonesia. 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan retribusi daerah (Indonesia. 2019). Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penerimaan retribusi harus melalui prosedur yang tertib, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan sistem

pencatatan yang baik serta penyetoran yang tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan panduan operasional dalam pengelolaan retribusi, mulai dari penetapan, pemungutan, hingga pelaporan (Indonesia. 2020). Dalam konteks Kota Padang, tata kelola retribusi pelayanan pasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2018. Perda ini mengatur besaran tarif retribusi, objek retribusi, subjek retribusi, mekanisme pemungutan, serta sanksi administratif bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya (Pemerintah Kota Padang. 2018).

Berdasarkan regulasi tersebut, mekanisme penyetoran retribusi pasar seharusnya dilakukan secara harian oleh petugas pemungut ke Bendahara Penerimaan UPTD Pasar, kemudian disetor ke RKUD paling lambat 1 x 24 jam sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 64 ayat (3). Sistem ini dirancang untuk meminimalisir risiko kebocoran dan memastikan transparansi penerimaan daerah. Namun demikian, implementasi aturan formal ini di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala teknis dan manajerial yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi.

Meskipun demikian, kontribusi PAD di banyak daerah di Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah

pusat. Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah diimplementasikan lebih dari dua dekade, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai wilayah Indonesia masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan adanya tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi pada banyak daerah, di mana PAD hanya memberikan kontribusi dalam porsi yang relatif kecil terhadap keseluruhan pendapatan daerah (Sari dkk. 2023: 45). Fenomena serupa juga tampak secara regional di Sumatera Barat.

Berdasarkan data APBD Kota Padang tahun 2021, PAD Kota Padang tercatat sebesar Rp 664,27 miliar (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2022). PAD ini terdiri dari berbagai komponen utama seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Tren peningkatan PAD terus berlanjut hingga tahun 2024. Data terkini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa sumber PAD yang paling signifikan adalah pajak daerah dan retribusi daerah, di mana pada tahun 2024 pajak daerah berkontribusi sebesar Rp 283.532,30 miliar, sementara retribusi daerah tercatat Rp 46.147,12 miliar.

Meskipun PAD memberikan kontribusi yang penting, sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, misalnya, realisasi PAD Kota Padang tercatat sebesar Rp 680,35 miliar, namun 65,93% dari total pendapatan daerah berasal dari

transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi dan mencerminkan perlunya peningkatan kontribusi PAD.

Salah satu sektor penting dalam PAD Kota Padang adalah retribusi pelayanan pasar. Pasar tradisional seperti Pasar Nanggalo memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD, terutama dengan potensi retribusi yang signifikan.

Pasar Nanggalo merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang memiliki posisi strategis sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat di wilayah tersebut. Berdasarkan data terkini per Januari 2025, Pasar Nanggalo Lantai 1 memiliki 59 unit petak yang aktif beroperasi, terdiri dari pedagang dengan berbagai jenis dagangan seperti sayur, emas, pakaian jadi, makanan ringan, rempah-rempah, plastik, telur, dan komoditas lainnya (Pengelola Pasar Nanggalo, 2025). Dengan total 59 pedagang aktif yang tercatat, Pasar Nanggalo memiliki potensi penerimaan retribusi yang signifikan bagi PAD Kota Padang.

Berdasarkan data realisasi retribusi Januari 2025 dari Pengelola Pasar Nanggalo (2025), struktur tarif retribusi pelayanan pasar bervariasi berdasarkan klasifikasi (kelas) dan ukuran petak. Tarif per meter persegi ditetapkan sebagai berikut: Kelas I sebesar Rp 8.750/m², Kelas II sebesar Rp 7.500/m², dan Kelas III sebesar Rp 6.250/m². Ukuran petak yang ditempati pedagang berkisar antara 4,5 m² hingga 15 m², menghasilkan retribusi bulanan per pedagang antara Rp 39.375 hingga Rp 131.250. Berdasarkan

realisasi bulan Januari 2025, total penerimaan retribusi mencapai Rp 5.463.750 per bulan dengan proyeksi tahunan sebesar Rp 65.565.000. Data ini menunjukkan bahwa dari 59 petak aktif di Lantai 1 Pasar Nanggalo, rata-rata retribusi per pedagang adalah sekitar Rp 92.606 per bulan, dengan jenis dagangan yang paling dominan adalah emas, pakaian jadi, dan produk Pakaian dan Dagangan.

Meskipun potensi retribusi pasar cukup besar, data realisasi penerimaan retribusi Pasar Nanggalo Lantai 1 pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 65.565.000 per tahun, dengan realisasi bulan Januari 2025 sebesar Rp 5.463.750 (Pengelola Pasar Nanggalo. 2025). Angka ini merupakan realisasi dari 59 petak aktif yang beroperasi di Lantai 1 Pasar Nanggalo. Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan penerimaan retribusi jika dilakukan optimalisasi pengelolaan, peningkatan kepatuhan pembayaran, dan adopsi sistem e-retribusi yang lebih efektif untuk meminimalkan tunggakan dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kontribusi retribusi terhadap PAD di daerah-daerah lain juga menunjukkan variasi yang signifikan. Di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023, PAD tercatat sebesar Rp 2,78 triliun, dengan kontribusi retribusi daerah yang lebih kecil, yakni Rp 16,04 miliar (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2023). Data ini mencerminkan tantangan serupa dalam meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD, terutama pada pasar-pasar tradisional.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan Ibu Miza Permatha Sari, S.SI (35 tahun), selaku Petugas Pemungut Retribusi di UPTD di Pasar Nanggalo untuk memperoleh gambaran mengenai sistem retribusi pasar. Adapun hasil wawancara peneliti tampilkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Realisasi Retribusi Pedagang Pasar Nanggalo Lantai 1
Bulan Januari 2025

No	Kode Pedagang	Los No Petak	Kelas	UK/M	Tarif/M	Ret/Bln (Rp)	Jml Bln	Ret/Thn (Rp)	Jenis Dagangan
1	2232	A 11/2	I	7.5	8,750	65,625	12	787,500	SAYUR
2	2233	11/2	I	7.5	8,750	65,625	12	787,500	SAYUR
3	2234	2	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
4	2248	11	I	15	8,750	131,250	12	1,575,000	P n D
5	2249	12	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	EMAS
6	2293	B 1	I	15	8,750	131,250	12	1,575,000	EMAS
7	2250	2	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
8	2259	11	I	15	8,750	131,250	12	1,575,000	P n D
9	2260	12	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	PAKAIAN JADI
10	2261	C 1	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	EMAS
11	2262	2	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
12	2265	7	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	SENDAL
13	2266	8	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	REMPAH-REMPAH
14	2267	D 1	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
15	2268	2	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	PAKAIAN JADI
16	2273	7	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	PAKAIAN JADI
17	2275	E 1	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
18	2276	2	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	PERAS KELAPA
19	2280	7	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	MAKANAN RINGAN
20	2282	F 1	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
21	2283	2	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
22	2288	7	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	P n D
23	2289	8	I	12	8,750	105,000	12	1,260,000	KERUPUK
24	2291	B1 N 1	I	4.5	8,750	39,375	12	472,500	TELUR
25	2292	BT 2	I	4.5	8,750	39,375	12	472,500	P n D
26	2236	3	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	MAINAN
27	2240	5	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	EMAS
28	2244	7	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	EMAS
29	2246	9	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	EMAS
30	2251	3	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	MAKANAN RINGAN
31	2253	5	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	EMAS
32	2255	7	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	MAKANAN RINGAN
33	2257	9	II	15	7,500	112,500	12	1,350,000	WARUNG MAKAN
34	2294	3	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	EMAS
35	2290	5	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	P n D
36	2269	3	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	P n D
37	2271	5	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	P n D
38	2277	3	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	WARUNG MAKAN

No	Kode Pedagang	Los No Petak	Kelas	UK/M	Tarif/M	Ret/Bln (Rp)	Jml Bln	Ret/Thn (Rp)	Jenis Dagangan
39	2295	5	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	MAKANAN RINGAN
40	2284	3	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	REMPAH-REMPAH
41	2286	5	II	12	7,500	90,000	12	1,080,000	KOSMETIK
42	2238	4	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PAKAIAN JADI
43	2242	6	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PAKAIAN JADI
44	2245	8	III	12	6,250	75,000	12	900,000	P n D
45	2247	10	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PERAK
46	2252	4	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PLASTIK
47	2254	6	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PLASTIK
48	2256	8	III	12	6,250	75,000	12	900,000	P n D
49	2258	10	III	12	6,250	75,000	12	900,000	WARUNG MAKAN
50	2263	4	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PAKAIAN JADI
51	2264	6	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PAKAIAN JADI
52	2270	4	III	12	6,250	75,000	12	900,000	REMPAH-REMPAH
53	2272	6	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PLASTIK
54	2274	8	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PAKAIAN JADI
55	2278	4	III	12	6,250	75,000	12	900,000	WARUNG MAKAN
56	2279	6	III	12	6,250	75,000	12	900,000	PERAS KELAPA
57	2281	8	III	12	6,250	75,000	12	900,000	TELUR
58	2285	4	III	12	6,250	75,000	12	900,000	REMPAH-REMPAH
59	2287	6	III	12	6,250	75,000	12	900,000	TELUR
					JUMLAH	5,463,750		65,565,000	

Sumber: Ibu Miza Permatha Sari, S.SI (35 tahun), Petugas Pemungut Retribusi UPTD Pasar Nanggalo, Januari 2025

Berdasarkan data retribusi pedagang Pasar Nanggalo Lantai 1 pada bulan Januari 2025, terdapat 59 pedagang yang seluruhnya dalam status aktif dengan total realisasi retribusi bulanan sebesar Rp5.463.750 dan proyeksi tahunan mencapai Rp65.565.000. Sistem retribusi diterapkan berdasarkan klasifikasi los dengan tiga kelas berbeda (I, II, dan III) dengan tarif per meter yang bervariasi, yaitu Rp8.750/m² untuk kelas I, Rp7.500/m² untuk kelas II, dan Rp6.250/m² untuk kelas III.

Pedagang kelas I terdiri dari 24 pedagang yang mendominasi dengan berbagai jenis dagangan seperti sayur, emas, pakaian jadi, kebutuhan pokok (P n D), sandal, rempah-rempah, peras kelapa, makanan ringan, kerupuk, dan telur. Sementara itu, kelas II mencakup 16 pedagang dengan dagangan utama

berupa mainan, emas, makanan ringan, warung makan, P n D, rempah-rempah, dan kosmetik. Kelas III terdiri dari 19 pedagang yang mayoritas menjual pakaian jadi, P n D, perak, plastik, warung makan, rempah-rempah, peras kelapa, dan telur.

Variasi luas area petak yang berkisar antara 4,5 hingga 15 meter persegi menyebabkan perbedaan besaran retribusi yang dibayarkan oleh masing-masing pedagang, dengan retribusi bulanan tertinggi mencapai Rp131.250 untuk los kelas I berukuran 15 m² dan terendah Rp39.375 untuk los kelas I berukuran 4,5 m².

Untuk keperluan penelitian, telah dipilih 12 pedagang sebagai informan yang merepresentasikan 20% dari total pedagang 59 pedagang di Lantai I Pasar Nanggalo. Distribusi informan adalah 4 informan untuk masing-masing kelas (I, II, dan III) sehingga memberikan gambaran representatif dari seluruh kelas pedagang di pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ibu Miza Permatha Sari, S.SI (35 tahun), selaku Petugas Pemungut Retribusi di UPTD Pasar Nanggalo ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi sistem retribusi pasar:

“Kendala utama yang dihadapi petugas dalam penarikan dan penyetoran retribusi adalah pedagang yang belum mengisi saldo rekening bank, GoPay, atau DANA, sehingga petugas harus bolak-balik meminta pembayaran. Kendala lainnya adalah sinyal atau jaringan yang susah di lapangan.”

(Wawancara dengan Ibu Miza Permatha Sari, S.SI, Petugas Pemungut Retribusi UPTD Pasar Nanggalo, 18 Februari 2025)

Meskipun menurut petugas retribusi sudah transparan, namun kendala teknis berupa jaringan menjadi penghambat. Urgensi penelitian ini diperlukan

untuk mengevaluasi efektivitas sistem e-retribusi yang telah berjalan dan menemukan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi agar pengelolaan retribusi dapat lebih efektif, mengingat tren penerimaan retribusi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Transformasi digital melalui implementasi sistem e-retribusi menjadi krusial dalam konteks modernisasi pengelolaan retribusi pasar di era digital saat ini. Sistem e-retribusi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan yang lebih efisien, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas yang mampu meminimalisir potensi kebocoran, mempercepat proses penyetoran ke RKUD, serta menyediakan data nyata untuk pengambilan keputusan. Penelitian Ingkiriwang dkk (2021: 685) membuktikan bahwa penerapan penuh sistem e-retribusi mampu meningkatkan efektivitas penerimaan hingga 97,3 persen. Namun demikian, keberhasilan implementasi e-retribusi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM pengelola, literasi digital pedagang, serta komitmen kelembagaan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Dalam konteks Pasar Nanggalo, rendahnya tingkat adopsi e-retribusi (8%) menjadi poin penting untuk menganalisis hambatan-hambatan implementasi teknologi dalam manajemen penerimaan retribusi pasar, sekaligus mengeksplorasi strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem digital dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi dan kontribusinya terhadap PAD Kota Padang.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan serupa juga terjadi di berbagai daerah. Penelitian Usfomeny dkk (2022: 80) di Kota Kupang menemukan bahwa kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pedagang dan lemahnya sistem pengawasan. Sementara itu, penelitian Ingkiriwang dkk (2021: 686) di Kota Manado membuktikan bahwa penerapan penuh sistem e-retribusi mampu meningkatkan efektivitas penerimaan hingga 97,3 persen. Temuan ini relevan untuk konteks Pasar Nanggalo, di mana masih banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem manajemen penerimaan retribusi.

Pemilihan Pasar Nanggalo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Pasar Nanggalo telah menerapkan sistem e-retribusi sejak tahun 2020 melalui QRIS yang mulai digunakan pada tahun 2021, sehingga memiliki pengalaman implementasi yang cukup untuk dievaluasi efektivitasnya.

Alasan kedua adalah meskipun target penerimaan retribusi selalu tercapai setiap bulannya dengan realisasi sebesar Rp 5.463.750 per bulan atau Rp 65.565.000 per tahun dan tren penerimaan yang stabil, namun terdapat permasalahan dalam implementasi sistem e-retribusi berupa kendala jaringan atau sinyal yang susah di lapangan serta pedagang yang belum mengisi saldo rekening bank, GoPay, atau DANA sehingga petugas harus bolak-balik meminta pembayaran.

Alasan ketiga adalah dengan rata-rata 500 pengunjung per hari, Pasar Nanggalo memiliki aktivitas perdagangan yang cukup signifikan namun

menghadapi tantangan teknis dalam pengelolaan retribusi yang menurut petugas sudah transparan namun terkendala oleh masalah jaringan.

Dengan karakteristik dan permasalahan tersebut, Pasar Nanggalo menjadi lokasi yang tepat untuk mengeksplorasi efektivitas manajemen penerimaan retribusi dan menemukan solusi atas kendala implementasi e-retribusi dalam konteks pasar tradisional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo Kota Padang serta kontribusinya terhadap PAD. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu manajemen publik dan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat tata kelola retribusi pasar yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah diimplementasikan lebih dari dua dekade, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Padang masih relatif rendah bila dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, dimana pada tahun 2025 sebesar 65,93% dari total pendapatan daerah Kota Padang masih berasal dari transfer pemerintah pusat.

2. Pasar Nanggalo yang telah menerapkan sistem e-retribusi sejak tahun 2020 melalui aplikasi QRIS (mulai digunakan 2021) masih menghadapi kendala implementasi berupa masalah jaringan atau sinyal yang susah di lapangan serta pedagang yang belum mengisi saldo rekening bank, GoPay, atau DANA sehingga petugas harus bolak-balik meminta pembayaran.
3. Rendahnya tingkat adopsi teknologi e-retribusi dalam pengelolaan retribusi pasar menghambat tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemungutan retribusi yang optimal, padahal penelitian terdahulu membuktikan bahwa penerapan penuh sistem e-retribusi mampu meningkatkan efektivitas penerimaan hingga 97,3 persen.
4. Masih terdapat potensi peningkatan penerimaan retribusi di Pasar Nanggalo jika dilakukan optimalisasi pengelolaan, peningkatan kepatuhan pembayaran, dan penyempurnaan implementasi sistem e-retribusi yang lebih efektif untuk meminimalkan tunggakan dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo, Kota Padang, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak membahas jenis retribusi daerah atau komponen PAD lainnya. Pembahasan berfokus pada aspek manajerial meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemungutan retribusi, serta implementasi sistem e-retribusi melalui aplikasi QRIS beserta

kendala-kendala teknisnya. Penelitian melibatkan perspektif aparat pengelola (Kepala UPTD Pasar Nanggalo, petugas pemungut retribusi, dan pejabat Badan Pendapatan Daerah) serta pedagang sebagai wajib retribusi, namun tidak membahas peran pasar modern, dana transfer dari pemerintah pusat, maupun dinamika perdagangan pasar secara umum.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo?
3. Bagaimana upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo.
3. Untuk merumuskan upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo agar mampu berkontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan PAD Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang administrasi publik, khususnya dalam konteks manajemen penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan PAD.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai efektivitas pengelolaan retribusi pelayanan pasar, khususnya di pasar tradisional sebagai salah satu sumber utama PAD.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan optimalisasi manajemen fiskal daerah, yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan atau studi kasus di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya pengelola Pasar Nanggalo untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan retribusi pasar.
- b. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan penerimaan retribusi, yang akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merancang strategi untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi di pasar tradisional, sehingga dapat mendukung tercapainya kemandirian fiskal daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan terhadap rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas manajemen penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Nanggalo menunjukkan hasil yang beragam pada setiap fungsi manajemen. Pencapaian target dan tingkat kepatuhan pedagang yang tinggi mengindikasikan keberhasilan fungsi pelaksanaan melalui sistem e-retribusi QRIS. Namun, fungsi perencanaan masih bersifat sentralistik tanpa partisipasi pedagang, pengorganisasian terkendala keterbatasan SDM, dan meskipun pengawasan dilakukan secara sistematis, tingkat kepuasan pedagang masih rendah, menunjukkan kontribusi terhadap PAD Kota Padang belum optimal secara menyeluruh.
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan retribusi di Pasar Nanggalo yang tersebar pada setiap tahapan manajemen meliputi minimnya partisipasi pedagang dalam perencanaan, beban kerja petugas tidak proporsional, infrastruktur telekomunikasi tidak memadai, minimnya transparansi penggunaan dana, kesenjangan literasi digital pedagang senior, keterbatasan kapasitas fiskal untuk perbaikan infrastruktur, sistem tarif yang tidak fleksibel dan kurang progresif, serta kondisi ekonomi pedagang yang fluktuatif.

3. Upaya dan strategi untuk meningkatkan efektivitas manajemen retribusi dan kontribusinya terhadap PAD Kota Padang mencakup pembentukan forum musyawarah pedagang-pemerintah, penambahan dan redistribusi petugas, peningkatan infrastruktur telekomunikasi dengan sistem *offline*, implementasi transparansi dan pelaporan publik, program pelatihan literasi digital, optimalisasi alokasi anggaran untuk perbaikan fasilitas, penerapan sistem tarif progresif berbasis kemampuan ekonomi, serta pengembangan mekanisme fleksibilitas pembayaran dan skema keringanan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan terhadap manfaat penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang perlu membentuk forum partisipatif pedagang-pemerintah dan menerapkan sistem tarif progresif untuk meningkatkan responsivitas kebijakan terhadap kemampuan ekonomi pedagang serta memperkuat legitimasi pengelolaan retribusi.
2. Pengelola Pasar Nanggalo menambah petugas pemungut, meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dengan sistem *offline backup*, dan mengimplementasikan transparansi pelaporan publik untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan akuntabilitas pengelolaan dana retribusi.
3. Diperlukan pelatihan literasi digital berkelanjutan bagi pedagang senior dan mekanisme pembayaran fleksibel dengan skema keringanan untuk

mengatasi kesenjangan teknologi dan mengakomodasi kondisi ekonomi pedagang dalam rangka meningkatkan kontribusi berkelanjutan terhadap PAD Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. Y. dan A. Hadi. 2024. *Manajemen Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Meningkatkan PAD Kota Ternate*. Jurnal Manajemen Bisnis Modern 6(2).
- Anggraini, A. V. dan A. Widiyarta. 2024. *Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan 13(4): 1066–1076.
- Aryani, E., N. P. T. Widanti dan I. A. P. S. Widnyani. 2025. *Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Denpasar*. Innovative: Journal of Social Science Research 5(1): 5132–5139.
- Atanggae, B. B. dan H. Sunarya. 2023. *Analisis Potensi Pendapatan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Inpres Waingapu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Timur 2019–2022*. Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang 10(2): 10–21.
- Azis, R. F. dan N. Husna. 2021. *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018–2020*. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan 9(3): 241.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2022. *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2022*. Diakses dari <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDI0IzI=/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-sumatera-barat-menurut-jenis-pendapatan.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2023. *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2023*. Diakses dari <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDI0IzI=/realisasi-pendapatan-pemerintah-provinsi-sumatera-barat-menurut-jenis-pendapatan.html>
- Dafina, P. A. dkk. 2023. *Studi Kajian Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Kajian dan Penelitian Umum 1(4): 211–222.
- Daga, R., A. Samad dan A. Mardana. 2023. *Smart Register, UMKM dan Pendapatan Asli Daerah*. Penerbit Adab.

- Dewi, P. A. P. L., A. Animah dan Y. Mariadi. 2021. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan*. Valid: Jurnal Ilmiah 19(1): 72–86.
- Diatmika, I. P. G. dan S. Rahayu. 2022. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Dinas Perdagangan Kota Padang. 2025. *Data UPTD Pasar Nanggalo*. Padang: Dinas Perdagangan Kota Padang.
- Ermawati, D. dan N. Mutiara. 2024. *Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari e-Retribusi Pasar di Pasar Kanigoro Kabupaten Blitar*. Otonomi 24(1): 197–202.
- Fajar, M. S., A. P. Atmaja dan H. Kusbandono. 2021. *Sistem Manajemen Pembayaran Retribusi Pasar di Kabupaten Madiun Menggunakan Smart Card*. Jurnal Cakrawala Ilmiah 1(4): 587–596.
- Fikri, M. A. R. dan M. B. Z. Tjenreng. 2025. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jurnal PKM Manajemen Bisnis 5(1): 291–304.
- Firdaus, H. dan B. Halimah. 2021. *Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah 2(1): 76–80.
- Fitrianingsih, S. D., I. K. B. Dwijaya dan S. Rahmawaty. 2025. *Pertumbuhan Ekonomi sebagai Moderator Pengaruh Pajak, Retribusi, dan Dana Perimbangan*. Jurnal Kolaboratif Sains 8(5): 2080–2091.
- Halim, A. dan R. Ratna. 2022. *Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju*. Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1(1): 1–9.
- Hamdillah, H. 2023. *Inovasi Pelayanan Publik dan Transformasi Birokrasi*. Resolusi: Jurnal Sosial Politik 6(2): 91–102.
- Handraini, H. dkk. 2024. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah di Kab. Pasaman Barat*. Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik 11(2): 593–600.
- Herwin, A. D. dan H. D. Hutagaol. 2023. *Intervensi Pemerintah terhadap Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Proyek Strategis Nasional*. Amsir Law Journal 4(2): 126–142.
- Hidayatullah, H. dkk. 2024. *Tingkat Kematangan Penerapan SPBE di Kabupaten Bima: Implikasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik*. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5(2): 256–266.

- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta
- Ingkiriwang, R., W. A. Tumbuan dan J. J. Sondakh. 2021. *Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 9(2): 683–692.
- Judijanto, L. dkk. 2024. *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karjuni, A. dan R. Apriliawati. 2024. *Pengelolaan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program 5(1): 105–119.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Data Realisasi APBD dan Pendapatan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Khairani, L. dan R. Fitri. 2022. *Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 6(4): 754–767.
- Laia, J. A. P., A. L. Tobing dan J. Pasaribu. 2025. *Strategi Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024*. Kalbisocio: Jurnal Bisnis dan Komunikasi 12(2): 1–9.
- Mardiasmo, M. B. A. 2021. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martoyo, A. dkk. 2022. *Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Tohar Media.

- Nai, R. S. 2024. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023*. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif 2(3): 137–170.
- Pangkey, I. dan M. I. R. Rantung. 2023. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Tahta Media.
- Pemerintah Kota Padang. 2018. *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar*. Sekretariat Daerah, Padang.
- Pengelola Pasar Nanggalo. 2025. *Data Retribusi Pedagang Pasar Nanggalo Lantai 1 Tahun 2025*. Padang: Dinas Perdagangan Kota Padang.
- Purnomo, R. A. dkk. 2022. *Penggalan dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah*. Gracias Logis Kreatif.
- Rachman, D., M. Iqbal dan N. S. Rahayu. 2021. *Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2019*. Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA 12(1): 117–130.
- Ramdhan, M. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Cipta Media Nusantara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robial, F. E. dkk. 2023. *Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Pelayanan Publik di Era Digital (Studi di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate)*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 5(1): 4293–4302.
- Roekminiati, S. dan A. Sunarya. 2024. *Efektivitas Penanganan Ketertiban Bangunan Liar (Studi Pelebaran Jalan Raya Manyar Kabupaten Gresik)*. Soetomo Administrasi Publik 2(3): 731–744.
- Sa'ada, A. E. dan W. Qarni. 2022. *Analisis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan 1(5): 645–652.
- Saadah, M., Y. C. Prasetyo dan G. T. Rahmayati. 2022. *Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif*. Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika 1(2): 54–64.

- Sahanaya, J., J. Madubun dan S. Laurens. 2025. *Analisis Dampak Kebijakan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8(3): 3203–3208.
- Sari, E. S., A. Frinaldi dan A. Asnil. 2023. *Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies 7(2).
- Sari, Y., A. Setiawan, B. F. Marina dan A. Mukhtar. 2024. *Analisis Sinergis antara Perencanaan Manajemen Strategik dan Kepuasan Kerja dalam Mengoptimalkan Kinerja Organisasi*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JUMAWA) 1(3): 149–164.
- Sepriano, S. dkk. 2023. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Silfiah, R. I. dan S. S. Rossa. 2023. *Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pandaan*. Sketsa Bisnis 10(2): 236–253.
- Simanjuntak, G. Y. dkk. 2025. *Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen 3(6): 260–273.
- Sonoto, J. F. 2025. *Hubungan Kapasitas Inovasi terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi 3(3): 144–150.
- Sudrajat, Y. dan I. Kristian. 2022. *Implementasi Aplikasi E-Retribusi di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang*. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen 3(2): 116–127.
- Suprpto, S. dan R. Purbowati. 2024. *Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Akuntansi Neraca 2(1).
- Susanto, D. dan M. S. Jailani. 2023. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah*. Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 1(1): 53–61.
- Suwarni, W. O. 2022. *Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas Perdagangan Kabupaten Buton)*. Kampua: Jurnal Ilmiah Akuntansi 1–18.

- Tanan, E. dan S. Horo. 2024. *Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang*. Journal of Practical Management Studies 2(1): 34–42.
- Terry, G. R. 1958. *Principles of Management*. Homewood, Illinois: R.D. Irwin.
- Usfomeny, M. M., H. A. Manafe dan G. G. Seran. 2022. *Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang*. Jurnal Ekonomi Pembangunan 10(1): 78–89.
- Wiardika, K. O. S. M., P. D. Yudartha dan K. W. D. Wismayanti. 2024. *Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Non Tunai (E-Retribusi) Pelayanan Pasar Kabupaten Tabanan*. IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government) 2(1): 106–118.
- Wilis, A. dan I. Nurbeti. 2022. *Implementasi Sistem Elektronik dalam Pemungutan Retribusi Daerah sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan 3(2): 23–34. <https://doi.org/10.33005/japk.v3i2.3987>
- Winarni, A. T. dan A. Asyidikri. 2024. *Analisis Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Semarang: Sebuah Kajian Interdisipliner untuk Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan*. Public Service and Governance Journal 5(2): 281–304.